

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2025

PERATURAN BUPATI NO.6,BD 2025/NO.6, 189 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2030

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya memenuhi hak dasar masyarakat Kabupaten Bandung Barat, pemerintahan daerah wajib memberikan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang adil dan transparan, perlu disusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal, ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum pada Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permen Sos No.9 Tahun 2018; Permendagri No.59 Tahun 2021; Permendik No.32 Tahun 2022; Permenkes No.6 Tahun 2024; Perbup KBB No.60 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagai pedoman dan dalam perencanaan, penganggaran, penanganan isu dan permasalahan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pengawasan, sinkronisasi dan koordinasi dalam pemenuhan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Rencana aksi Penerapan SPM dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah SPM meliputi pendahuluan, kondisi umum wilayah, analisis kondisi pemenuhan SPM pada pelayanan dasar dan permasalahan yang akan dihadapi, kebijakan nasional pencapaian SPM, rencana aksi daerah pencapaian SPM dan mekanisme, monitoring, evaluasi dan pelaporan SPM; Pemantauan dan Evaluasi; Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM melalui pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala,, bimbingan teknis dan konsultasi; Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 April 2025;

- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan : 183 Hlm.